

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN PENGAWASAN
KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh :

CHRISTA KAH NGGADJI

2019110249

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2023

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerangka akuntansi keuangan provinsi, pengawasan keuangan, dan kemampuan sumber daya manusia digunakan oleh 3 SKPD Pemda Batu dan bagaimana pengaruhnya terhadap jenis laporan keuangan. Analisis sangat ingin mengklaim perbedaan ini karena hasilnya ambigu dan tidak ada pakar sebelumnya yang secara bersamaan menilai ketiga kriteria tersebut. Strategi evaluasi kuantitatif asli adalah teknik eksplorasi yang digunakan dalam penyelidikan ini. Program Wawasan Sains (SPSS) digunakan untuk mengelola data yang dikumpulkan untuk fokus ini melalui wawancara, diskusi, dan kuesioner. Teknik pencerah kuantitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Evaluasi ini melibatkan 60 responden uji. Berbagai uji relaps langsung, uji asumsi dari masa lalu, uji f dan t yang bersamaan dan tidak lengkap, uji legitimasi dan kualitas yang tak tergoyahkan, dan lain-lain digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hal ini. Temuan eksperimen di SKPD Kota Batu menunjukkan hubungan positif yang sangat substansial antara modal dan jenis pelaporan keuangan. Tes ini menunjukkan bahwa asumsi bahwa variabel keterampilan SDM mempengaruhi pelaporan moneter dilihat dan sering diterima. Strategi pelaksanaan SAKD dipengaruhi oleh laporan keuangan yang digunakan SKPD Kota Batu. Karena variabel Penerapan SAKD diyakini berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 harus diabaikan. Pengendalian Keuangan atas Berbagai Laporan Keuangan di SKPD Kota Batu. Penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, dan pengaruh variabel pengendalian moneter terhadap variabel kualitas laporan keuangan diterima secara umum.

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi, Pengawasan Keuangan, Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perincian pengelolaan uang pemerintah di Indonesia sangat menarik untuk diteliti, terutama mengingat karakteristik kewajiban yang semakin tinggi dan tekanan pada organisasi untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik kepada lembaga publik, baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Administrasi moneter teritorial yang hebat disebut sebagai kemampuan mengelola strategi keuangan daerah secara metodis, efektif, sederhana, dan penuh perhatian (Pujanira dan Taman, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang teratur, bertanggung jawab dan transparan merupakan kebutuhan pemerintahan yang bersih. Untuk mencapai tujuan administrasi yang sangat baik, negara tetangga harus mengelola uang provinsi secara bertanggung jawab dan terbuka dalam hubungannya dengan otoritas publik dan masyarakat luas. Tujuan organisasi yang mendistribusikan laporan keuangan mereka adalah mencari alternatif yang bermanfaat untuk data fundamental yang dibutuhkan oleh pakar publik, masyarakat umum, dan berbagai kelompok, seperti kantor pemantauan eksekusi, sekutu keuangan, dan lain-lain. Peraturan No. 33 Tahun 2004 mengatur janji asosiasi untuk menyediakan rencana keuangan untuk setiap periode. Untuk situasi ini, yayasan negara terdekat yang mengelola kas dewan harus memiliki manajemen yang sangat baik, basis pengetahuan yang sangat baik terkait dengan akuntansi, dan persiapan yang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kebutuhan kas dewan. Ini membuatnya lebih mudah untuk membangun sistem akuntansi yang efektif. Dengan asumsi pejabat pemerintah daerah tidak dapat membangun kredensial atau memahami akuntansi, hal ini akan mengakibatkan kegagalan untuk menyusun laporan

keuangan dan pelanggaran aturan hukum. Laporan keuangan berguna dalam menetapkan keandalan dan keaslian mayoritas pemerintah. Perencanaan laporan keuangan yang disusun secara lengkap berdasarkan SAP yang merespons APBN secepat mungkin sesuai dengan persyaratan pertanggungjawaban dan kulminasi (Risnaningsi, 2017).

Bagi organisasi pemerintahan Indonesia yang mulai lebih berkembang dalam pelaksanaannya, yang menampilkan perubahan undang-undang tidak resmi, Pemda Batu sangatlah penting. Untuk membuat organisasi mereka lebih layak, efisien dan bermanfaat, mereka harus secara tegas memodifikasi, mengubah, meningkatkan dan melengkapinya. Namun demikian, selama dua tahun berturut-turut (2016–2017), Kota Batu menduduki peringkat terakhir dari 38 jaringan metropolitan di Wilayah Jawa Timur dalam evaluasi struktur pelaksanaan tugas SAKIP. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan regional mechanical gathering di Kota Batu tidak berjalan sesuai rencana. karena komunikasi lembaga pemerintah yang lamban, kesalahan dibuat dalam perencanaan RPJMD dan program bantuan daerah, dan rencana aksi keuangan yang tidak tepat dari pemerintah. Hal ini mendorong Pemda Batu untuk segera mengembangkan proses kerja manajerialnya, salah satunya dengan berkonsentrasi pada penggunaan SDM, penggunaan struktur pembukuan moneter wilayah, dan mencermati laporan keuangan Pemprov Batu (Fadhlurrahman, Ridho. 2018).

Hal yang aneh, pada kenyataannya, masih ada banyak sekali laporan keuangan yang tidak pantas tersedia. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak dilaporkan karena SDM yang buruk, penggunaan kerangka pengawasan dan pembukuan daerah yang buruk, pengenalan yang tidak sepenuhnya mengikuti pedoman pembukuan pemerintah

(SAP), dan pelanggaran aturan dan peraturan. . Pengampunan dan tanggung jawab pengelolaan uang negara dapat dilakukan melalui permintaan tanggung jawab keuangan pemerintah yang disiapkan sesuai dengan biaya pemerintah dan tiba tepat waktu serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Laporan keuangan pemerintah mencakup banyak informasi, dan konsistensi dengan prinsip akuntansi dan struktur pembukuan pendukung berpengaruh terhadap informasi tersebut. Pemberian laporan keuangan daerah yang berwibawa membutuhkan SDM yang paham dan terampil dalam bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan hubungan pemerintahan. Jumlah pengalaman pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan rencana keuangan adalah faktor lain. Sangat penting untuk memiliki jumlah perwakilan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti unit kerja daerah, dengan kredensial akuntansi yang kuat untuk mengelola uang provinsi dengan sukses dan efisien. Pers, sekutu keuangan, penghuni, anggota masyarakat umum, perwakilan masyarakat umum, kantor pengatur, kantor administrasi, mereka yang memproduksi atau berpartisipasi dalam siklus hadiah, dan orang lain yang memiliki hubungan nyaman dengan segala sesuatu yang terjadi pada adalah salah satu pertemuan yang dikendalikan, dipilih, dan diselenggarakan untuk menggunakan laporan keuangan pemerintah (Muhammadiyah . 2010).

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2018), sejumlah kompetensi SDM berdampak baik pada interaksi antara kebutuhan SDM dengan sifat LKPD. Dalam laporan ringkasnya, Zuliarti (2012) mencatat bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap jenis LKPD. Menilai kembali variabel kapasitas aset manusia penting karena sifat temuan penelitian yang tidak menentu.

Pelaksanaan Pembukuan Moneter Wilayah yang berpedoman pada standar pembukuan pemerintah dan berupaya meningkatkan tanggung jawab dan

dukungan kepada kepala keuangan daerah melalui kesiapan dan penyempurnaan prinsip-prinsip pembukuan pemerintah merupakan faktor selanjutnya yang mempengaruhi sifat laporan pemerintah daerah. Kajian Nurillah (2014) yang meneliti bagaimana pengaruh penggunaan akuntansi keuangan provinsi terhadap karakteristik LKPD menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap karakteristik tersebut. Sementara itu, Ihsanti (2014) meneliti bagaimana penggunaan penyusunan Common Money Related Accounting berdampak negatif terhadap kepribadian LKPD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi konsep pelaporan keuangan. Analisis Pujiswara et al. (2014) tentang dampak penggunaan sistem pengawasan keuangan provinsi dan sistem informasi akuntansi keuangan umum terhadap nilai informasi perincian keuangan dan kewajiban pemerintah daerah (fokus pada satuan kerja perangkat daerah di wilayah Kungklung) menunjukkan sejauh mana peraturan keuangan pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Mansur et al. (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi aspek-aspek tersebut serta nilai ketepatan informasi pemerintah daerah.

Temuan yang bertentangan dari penelitian sebelumnya telah mendorong pemeriksaan untuk mempertimbangkan sifat pengumuman keuangan pemerintah dalam organisasi pemerintah. menilai relevansi laporan kualitas keuangan DPRD. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengawasan Keuangan Terhadap**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan Pemda Kota Batu tergantung pada kompetensi sumber daya manusianya?
2. Apakah penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu?
3. Apakah pengawasan keuangan berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu?
4. Apakah kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Batu secara bersamaan bergantung pada keterampilan sumber daya manusia, penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengingat karakterisasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia.
2. Meneliti dan mengevaluasi apakah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batu dipengaruhi oleh penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Mengevaluasi dampak Pengawasan Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu.
4. Untuk mengetahui apakah pengawasan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota

Batu.

1.4 Paradigma Penelitian

Pandangan dunia logis dan pandangan dunia normal adalah dua kriteria yang sering digunakan dalam analisis logis. Menurut Harmon (Moleong, 2012), pandangan dunia adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, mengevaluasi, dan bertindak dengan cara yang berhubungan langsung dengan dunia nyata. Mengingat definisi pandangan dunia pemeriksaan yang disebutkan di atas, biasanya diasumsikan bahwa pandangan dunia eksplorasi berfungsi sebagai dasar bagi perspektif ilmuwan dalam mengarahkan eksplorasi dalam kaitannya dengan masalah terkait pemeriksaan mereka. Menyatukan pemikiran ini akan mengarahkan ahli ke arah konsep hipotesis yang akan digunakan, serta taktik, strategi, dan proses pemeriksaan investigasi tambahan, sehingga dapat dilakukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk melakukan studi lebih mendalam tentang masalah ini untuk mendefinisikan dan mempraktikkan ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Bagi Universitas

Investigasi ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengaruh kemampuan sumber daya manusia, penggunaan kerangka akuntansi keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan terhadap karakter laporan keuangan pemerintah di Kota Batu dan berfungsi sebagai titik awal untuk penelitian sarjana masa depan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai landasan atau acuan bagi mereka yang terlibat dalam administrasi

keuangan wilayah, khususnya kantor akuntansi, negara bagian dapat menggunakan ini untuk memastikan bahwa tugas dan tugas pembukuan mereka diselesaikan dengan benar, yang mengarah ke laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas tinggi.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pemeriksaan ini dibatasi pada pembuatan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sifat laporan keuangan Pemerintah Daerah Batu untuk menghindari kesalahan yang teridentifikasi dalam penilaian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat
- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. (2012). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Angga, Dwi Permadi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemda terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Bandung.
- Donni Juni Priansa (2018), *Perencanaan dan Pengembangan SDM*, Penerbit Alfabeta Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi; dan Paulus K. Allo Layuk. 2018. Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Vol 3, No 1 (2018)*
- Erni Ermi, Gunawan Bata Ilyas, Hasmin Tasmin *Kabupaten Bantaeng Jurnal kajian ekonomi*
- Fikri, Miftahul. 2011. Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Firdaus, Nadirsyah, & Heru, Fahlevi. (2015). Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*
- Harahap, E, Nusyirwan, 2012. Induksi Pertumbuhan Nanas (Ananas Comosus L) In Vitro Asal Pangaribuan Dengan Pemberian Zat Pengatur Tumbuh Kinetin. Semirata BKS-PTN Wil. Barat. UNIMED, Hotel Madani
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Ihsanti 2014. (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang*
- Mahmudi, 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*, edisi kedua. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta

- Mansur dkk, (2017) *pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah terhadap laporan keuangan pemerintah*
- Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongaluh Kota Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara *Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang.*
- Nurillah (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.*(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).
- Pujiswara 2017. *Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah aceh*
- Pujanira, Putriasri (2017). pemerintah daerah provinsi DIY". *Jurnal Nominal. Volume 6 Nomor 2.*
- Rahardjo, M.Dawam. (2010). *Intelektual, Intelegasi, dan Perilaku Politik dan Bangsa.* Bandung: Mizan
- Reno Julia Utama, (2017). (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon, Vol. 4 No.1.* Universitas Riau.
- Riedy Riandani . 2017. *Pengaruh Kompetensi SDM Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Lima
- Risnarningsih, Ahmad Mukoffi, Filaria Hendrani (2017) *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang*
- Sudarmanto (2015). *Kinerja dan Pengembangan kompetensi SDM* (Cetakan Ketiga 2015). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Saydam Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi. (2013). *Konsep dan praktek penulisan riset keperawatan* (Ed.2) Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.

Zuliarti. 2018. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muria Kudus.